

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. KPP Pratama merupakan gabungan antara Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertamahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pembentukan KPP Pratama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kantor Wilayah Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007.

2. Visi, Misi, Motto dan Slogan KPP Pratama Batu

KPP Pratama Batu memiliki visi, misi, motto, dan slogan sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang positif. Berikut adalah visi, misi, motto, dan slogan KPP Pratama Batu:

a. Visi

Menjadi institusi yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang–Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Motto

Mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

d. Slogan

Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya.

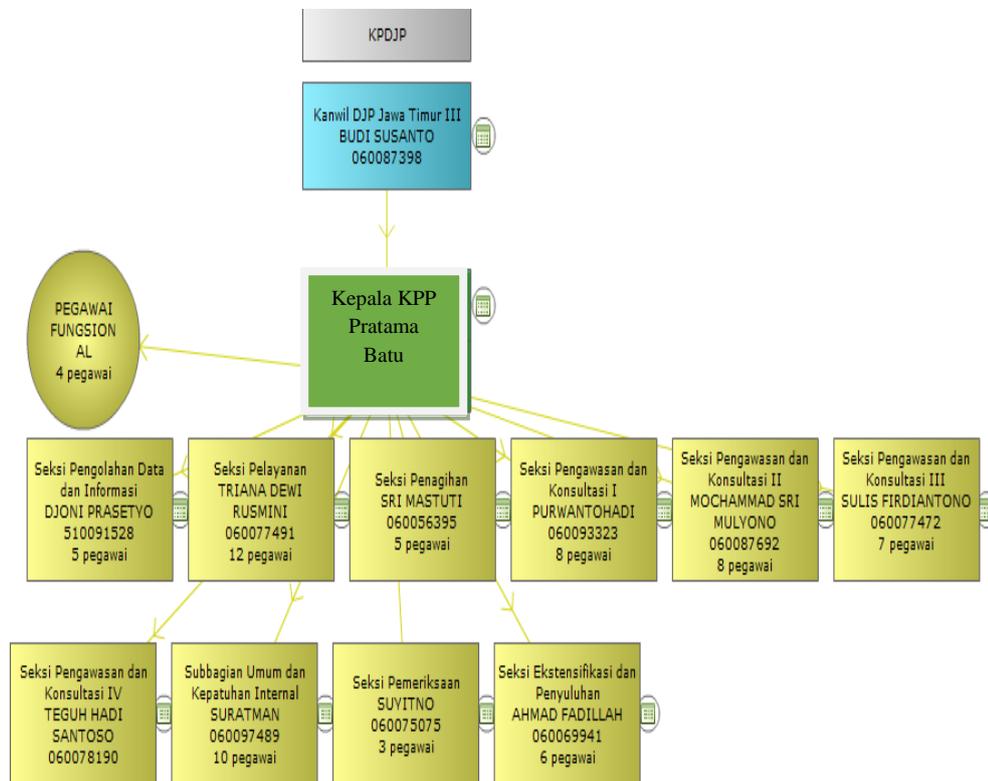
3. Lokasi KPP Pratama Batu

Pada awal beroperasinya KPP Pratama Batu masih bergabung di KPP Pratama Malang Utara di jalan Merdeka Utara No.2 Malang. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2002 KPP Pratama Batu pindah dan mulai menempati gedung milik KUD Batu di Jalan Diponegoro No.8 Batu dengan status kontrak (sewa).

Pada tanggal 1 Januari 2005 KPP Pratama Batu mulai menempati gedung sendiri. Lokasi KPP Pratama Batu sama dengan lokasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Alamat dari KPP Pratama Batu adalah Jalan Letjen S.Parman No. 100 Malang 65122, Telp (0341) 403411.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan KPP Pratama Batu

a. Struktur Organisasi



Gambar 3: Struktur Organisasi KPP Pratama Batu

Sumber: *Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Batu (2016)*.

b. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka dapat diberikan keterangan singkat mengenai fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagian yaitu:

1) Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama Batu mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama Batu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional Pemeriksaan berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai Berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

3) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling* dan penyiapan laporan kinerja.

4) Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen, dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Kepala Seksi Penagihan

Kepala Seksi Penagihan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representatif* (AR/Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta wilayah atau Blok PBB dengan mempertimbangkan keseimbangan beban kerja.

7) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menjunjung kelancaran tugas Kepala Kantor dalam Mengkoordinasikan tugas dan pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal

pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapannya.

8) Kepala Seksi Pemeriksaan

Kepala Seksi Pemeriksaan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

9) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Kepala Seksi Ekstensifikasi membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

Kota Batu yang merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Batu memiliki luas wilayah 202,30 Km² atau sama dengan 20,280 Ha. Jumlah keseluruhan wajib pajak di kota Batu yang terdaftar hingga tahun 2015 yaitu sebanyak 24.456 wajib pajak, yang terdiri dari 21.381 wajib pajak orang pribadi, 2.720 wajib pajak badan, dan 355 pemungut. Wilayah kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu 1) kecamatan batu; 2) kecamatan junrejo; 3) kecamatan bumiaji. Agar lebih jelas bagaimana wilayah kerja dari KPP Pratama Batu mulai dari desa atau kelurahan sampai tingkat kecamatan. Berikut akan dijelaskan wilayah kerja Kantor KPP Pratama Batu yaitu sebagai berikut:

Tabel 7 Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Batu	Nganglik Oro-Oro Ombo Pesanggrahan Sidomulyo Sisir Songgokerto Sumberejo Temas	Luas Wilayah = 4.588,81 Ha Jumlah Penduduk = 80.582 jiwa
2	Junrejo	Tlekung Junrejo Mojorejo Torongrejo Beji Dadaprejo Pendem	Luas Wilayah = 2.565,89 Ha Jumlah Penduduk = 172.015 jiwa
3	Bumiaji	Turungrejo Bumiaji Giripuro Punten Sumber Brantas Gunungsari Bulukerto Pandanrejo Sumbergundo	Luas Wilayah = 12.797.89 Ha. Jumlah Penduduk = 51.054 jiwa

Sumber: *Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Batu (2017).*

6. Sumber Daya Manusia (SDM) KPP Pratama Batu

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu padabulan April tahun 2015 secara keseluruhan mencapai 70 (tujuh puluh) orang pegawai yang terbagi dari struktur teratas sendiri yaitu kepala kantor. Untuk kepala kantor sendiri membawahi pegawai fungsional, kemudian membawahi juga subbagian umum dan kepatuhan internal dan terakhir membawahi 10 (sepuluh) seksi-seksi yang berada dilingkungan KPP Pratama Batu. Adapun penjelasannya akan dipaparkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Bagian Pekerjaan

Jenis Bagian	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1 orang
Pegawai Fungsional	4 orang
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10 orang
Seksi Pengolahan Data dan Informasi	5 orang
Seksi Pelayanan	12 orang
Seksi Penagihan	5 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	8 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	8 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	8 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	7 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	1 orang
Seksi Pemeriksaan	3 orang
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	6 orang
TOTAL	70 orang

Sumber: *Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Batu (2017)*.

Sumber daya manusia yang berada dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Batu mencapai total 70 (tujuh puluh) orang pegawai, yang terdiri dari kepala kantor 1 (satu) orang pegawai, pegawai fungsional 4 (empat) orang pegawai, subbagian umum dan kepatuhan internal 10 (sepuluh) orang pegawai, seksi pengolahan data dan informasi 5 (lima) orang pegawai, seksi pelayanan 12 (dua belas) orang pegawai, seksi penagihan 5 (lima) orang pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi I ada 8 (delapan) orang pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi II ada 8 (delapan) orang pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi III ada 7 (tujuh) orang pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi IV ada 1 (satu)

orang pegawai, seksi pemeriksaan 3 (tiga) orang pegawai, dan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan ada 6 (enam) orang pegawai.

B. Penyajian Data

1. Deskripsi Variabel Penagihan Pajak

Pada penelitian ini, variabel X_1 adalah penagihan pajak. Data penagihan pajak diukur berdasarkan banyaknya surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu secara bulanan dalam kurun waktu selama 4 tahun. Banyaknya surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dapat dilihat berdasarkan Tabel 9.

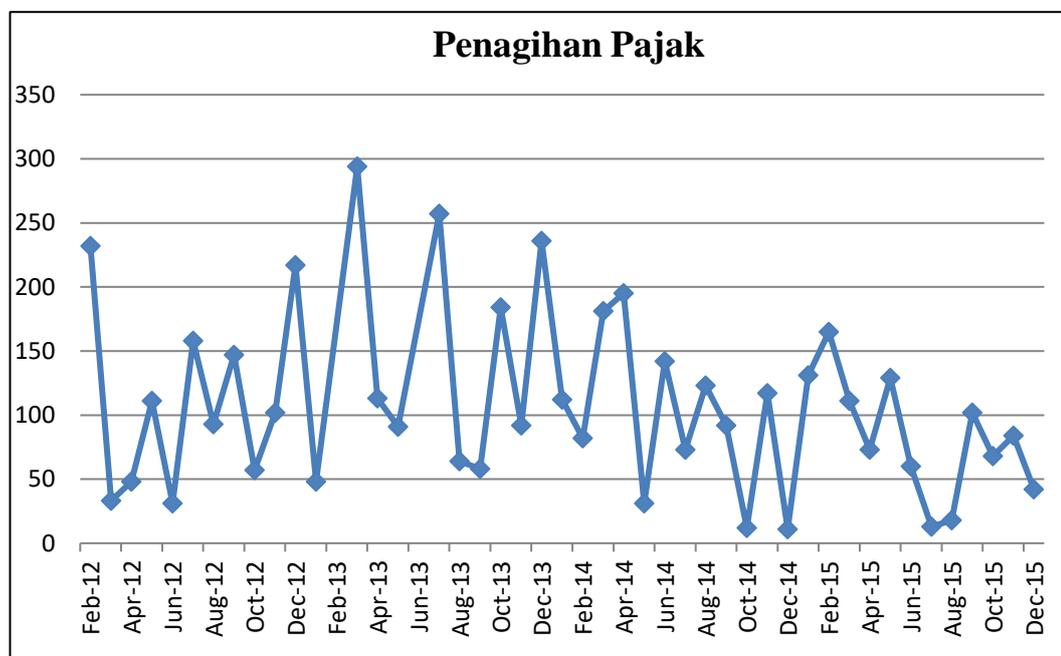
Tabel 9. Penagihan Pajak tahun 2012-2015 (lembar)

Bulan	2012	2013	2014	2015
Januari	63	48	112	131
Februari	232	142	82	165
Maret	33	294	181	111
April	48	113	195	73
Mei	111	91	31	129
Juni	31	280	142	60
Juli	158	257	73	13
Agustus	93	64	123	18
September	147	58	92	102
Oktober	57	184	12	68
November	102	92	117	84
Desember	217	236	11	42
Maksimum	232	294	195	165
Minimum	31	48	11	13
Rata-rata	107,67	154,92	97,58	83

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan data pada tabel 9, di tahun 2012 penagihan pajak tertinggi mencapai sebesar 232 lembar dan terendah sebesar 31 lembar. Rata-rata penagihan pajak ditahun tersebut adalah sebesar 107,67 lembar. Tahun kedua

periode penelitian yaitu tahun 2013, penagihan pajak tertinggi mencapai 294 lembar, sedangkan terendahnya sebesar 48 lembar. Rata-rata penagihan pajak di tahun 2013 sebesar 154,92 lembar. Pada tahun 2014, penagihan pajak tertinggi sebesar 195 lembar dan terendah sebesar 11 lembar. Rata-rata penagihan pajak di tahun tersebut sebesar 97,58 lembar. Tahun 2015, penagihan pajak tertinggi mencapai sebesar 165 lembar, sedangkan terendah sebesar 13 lembar. Rata-rata penagihan pajak pada tahun 2015 sebesar 83 lembar.



Gambar 4 Perkembangan Penagihan Pajak Periode Januari 2012-Desember 2015

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan gambar tersebut, penagihan pajak yang dilakukan dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah banyaknya surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012 sebesar 1292 lembar, tahun 2013 meningkat menjadi 1859 lembar. Pada tahun 2014 menurun menjadi

1171 buah dan kembali mengalami penurunan yaitu puncaknya pada tahun 2015 sebesar 996 lembar.

2. Deskripsi Variabel Jumlah Wajib Pajak

Pada penelitian ini, variabel X₂ adalah Jumlah Wajib Pajak. Data jumlah Wajib Pajak diukur berdasarkan penambahan jumlah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi setiap bulannya selama kurun waktu 4 tahun di KPP Pratama Batu. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Batu dapat dilihat berdasarkan Tabel 10.

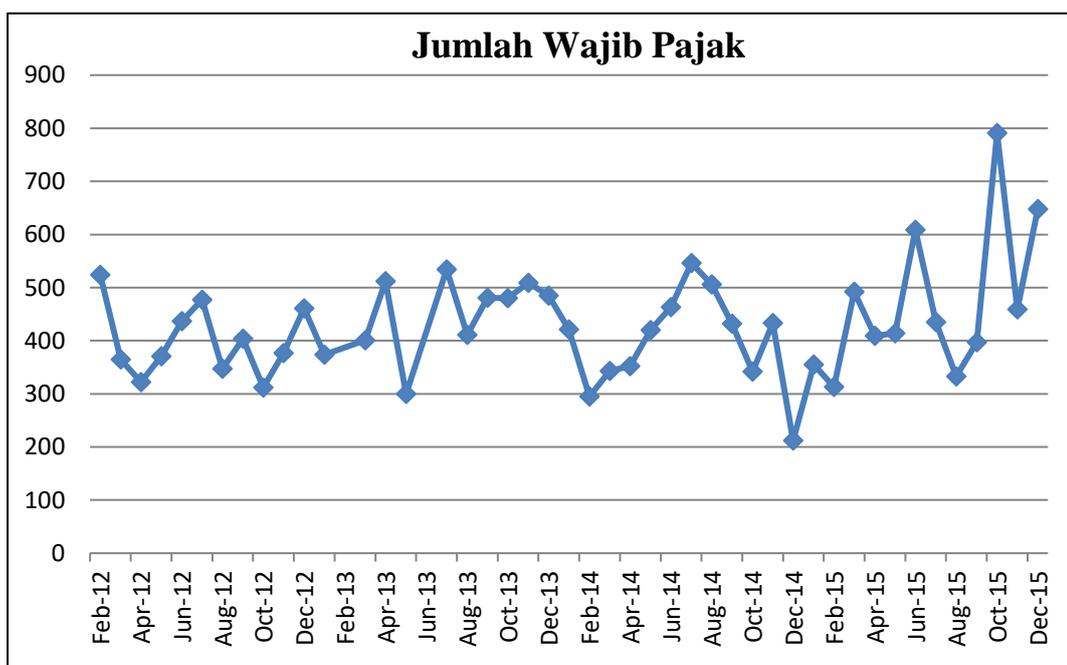
Tabel 10. Jumlah Wajib Pajak tahun 2012-2015 (WP)

Bulan	2012	2013	2014	2015
Januari	424	374	421	355
Februari	524	557	295	313
Maret	365	401	343	492
April	322	512	352	409
Mei	371	300	420	414
Juni	437	382	463	609
Juli	477	534	546	435
Agustus	347	411	506	333
September	404	481	432	397
Oktober	312	480	342	791
November	377	509	433	459
Desember	461	485	212	648
Maksimum	524	557	546	791
Minimum	312	300	212	313
Rata-rata	401,75	452,17	397,08	471,25

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan data pada tabel 10, di tahun 2012 penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi mencapai sebesar 524 Wajib Pajak dan terendah sebesar 312 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun tersebut sebesar 401,75 Wajib Pajak. Tahun 2013, penambahan jumlah Wajib pajak tertinggi

mencapai sebesar 557 Wajib Pajak, sedangkan terendahnya sebesar 300 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun 2013 yaitu sebesar 452,17 Wajib Pajak. Pada tahun 2014, penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi sebesar 546 Wajib Pajak dan terendah sebesar 212 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun 2014 yaitu sebesar 397,08 Wajib Pajak. Tahun 2015, penambahan jumlah Wajib Pajak tertinggi sebesar 791 Wajib Pajak, sedangkan terendah sebesar 313 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun 2015 adalah sebesar 471,25 Wajib Pajak.



Gambar 5 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Periode Januari 2012-Desember 2015

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah Wajib Pajak cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012, total penambahan Wajib Pajak sebesar 4821 Wajib Pajak. Tahun 2013, mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 5426 Wajib Pajak. Tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4765 Wajib Pajak dan Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5655 Wajib Pajak.

3. Deskripsi Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan

Pada penelitian ini, variabel Y adalah Penerimaan Pajak Penghasilan. Data penerimaan Pajak Penghasilan diukur berdasarkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan secara bulanan sesuai dengan asas Pasal 25. Penerimaan Pajak Penghasilan dilakukan dalam kurun waktu selama 4 tahun. Data diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Batu dapat dilihat berdasarkan Tabel 11.

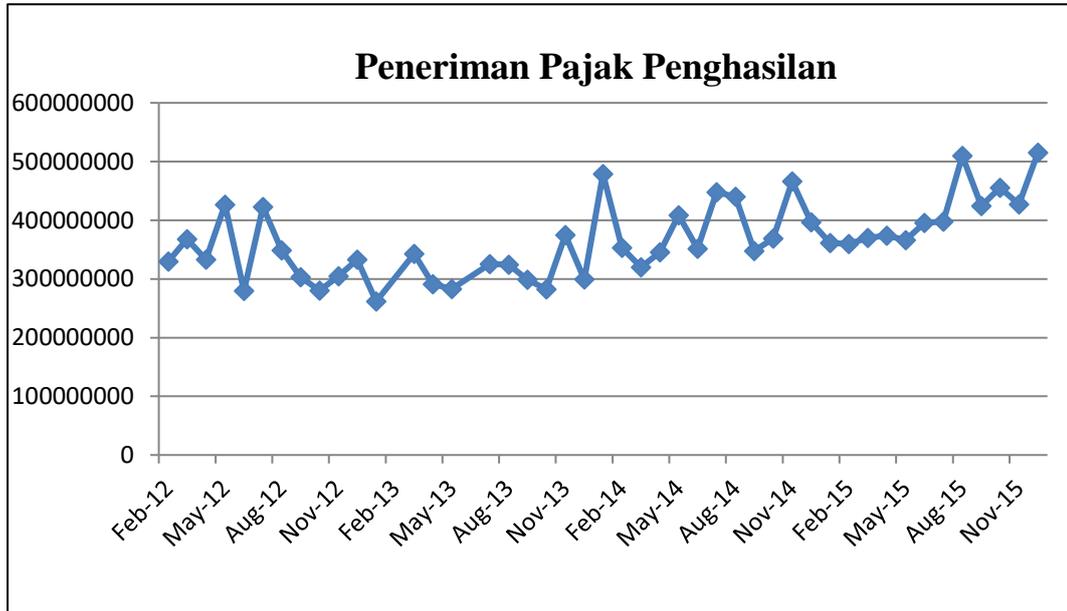
Tabel 11. Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Bulan	2012	2013	2014	2015
Januari	379.322.356	261.586.069	479.038.748	361.330.246
Februari	329.479.161	587.223.879	352.882.390	359.713.792
Maret	367.869.857	342.716.191	320.005.217	370.241.775
April	332.843.889	291.344.016	345.498.210	374.018.393
Mei	426.810.620	282.754.605	408.591.171	366.234.472
Juni	279.763.535	300.518.993	351.411.350	395.346.945
Juli	422.826.327	325.482.189	447.657.929	397.973.519
Agustus	348.669.712	324.320.424	439.963.589	509.693.487
September	303.310.266	298.775.850	347.832.369	424.159.532
Oktober	280.413.231	282.535.191	369.152.823	455.557.163
November	304.840.526	374.912.212	466.315.522	427.019.753
Desember	333.096.241	299.270.442	396.477.020	515.271.210
Maksimum	426.810.620	587.223.879	479.038.748	515.271.210
Minimum	279.763.535	261.586.069	320.005.217	359.713.792
Rata-rata	342.437.143,4	330.953.338,4	393.735.528,2	413.046.690,6

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan data pada tabel 11, di tahun 2012 penerimaan pajak penghasilan tertinggi mencapai nilai sebesar Rp 426.810.620 dan nilai terendah

sebesar Rp 279.763.535. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan di tahun tersebut adalah sebesar Rp 342.437.143,4. Tahun 2013, penerimaan penghasilan tertinggi mencapai nilai sebesar Rp 587.223.879 dan nilai terendah sebesar Rp 261.586.069. Rata-rata untuk penerimaan pajak penghasilan tahun 2013 adalah sebesar Rp 330.953.338,4. Tahun 2014, penerimaan pajak penghasilan tertinggi mencapai nilai sebesar Rp 479.038.748 dan nilai terendah sebesar Rp 320.005.217. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan di tahun 2014 sebesar Rp 393.735.528,2. Tahun 2015, nilai tertinggi dari penerimaan pajak penghasilan mencapai sebesar Rp 515.271.210 dan terendah sebesar Rp 359.713.792. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan di tahun 2015 adalah sebesar Rp 413.046.690,6.



Gambar 6 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode Januari 2012-Desember 2015

Sumber : KPP Pratama Batu

Berdasarkan gambar tersebut, penerimaan Pajak Penghasilan cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012 total penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 4.109.245.721. Tahun 2013, mengalami penurunan yakni menjadi sebesar Rp 3.971.440.061. Selanjutnya mengalami peningkatan lagi di tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp 4.724.826.338 dan Rp 4.956.560.287.

C. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif pada bagian ini digunakan untuk mengetahui nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari data yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 data. Data tersebut merupakan data bulanan dengan periode tahun 2012-2015.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 12 dapat dijelaskan bahwa selama empat tahun terakhir nilai terendah (minimum) dari variabel penagihan pajak adalah 11 lembar. Nilai tersebut terjadi di tahun 2014 bulan Desember. Variabel jumlah Wajib Pajak terendah adalah 212 Wajib Pajak. Nilai tersebut terjadi di tahun 2014 bulan Desember. Variabel penerimaan pajak penghasilan terendah adalah Rp 261.585.069 di tahun 2013 bulan Januari.

Nilai tertinggi (maksimum) yang dicapai oleh variabel penagihan pajak selama periode 2012-2015 adalah 294 lembar pada bulan Maret tahun 2013. Nilai jumlah Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Oktober tahun 2015. Jumlah Wajib Pajak tertinggi saat itu sebesar 791 Wajb Pajak. Nilai tertinggi penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 587.223.879 yang terjadi di bulan Februari tahun 2013.

Tabel 12. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penagihan_Pajak	48	11	294	110.79	71.726
Jumlah_WP	48	212	791	430.56	101.067
PPh	48	261586069	587223879	370043175.15	69986398.889
Valid N (listwise)	48				

Sumber : Lampiran 4 , 2017

Nilai rata-rata (mean) penagihan pajak adalah sebesar 110,79 lembar. Rata-rata jumlah Wajib Pajak selama periode 2012-2015 adalah 430,56 Wajib Pajak. Penerimaan pajak penghasilan memiliki rata-rata sebesar Rp 370.043.175,15. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 12, dapat diketahui standar deviasi dari masing-masing variabel. Penagihan pajak memiliki nilai standar deviasi sebesar 71,726. Nilai jumlah Wajib Pajak adalah 101,067 dan Nilai standar deviasi dari penerimaan pajak penghasilan adalah sebesar 69.986.398,889.

2. Statistik Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila memenuhi asumsi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas

didalam model regresi dapat digunakan dengan mengukur nilai VIF dan *tolerance*. Nilai VIF merupakan faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas sehingga apabila nilai VIF semakin besar, maka hubungan antar variabel bebas semakin erat. Nilai *tolerance* merupakan tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (α) sehingga apabila nilai *tolerance* semakin kecil maka hubungan antar variabel bebas semakin erat. Jika nilai $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,1$ maka suatu model terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficients	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penagihan_Pajak	.989	1.011
Jumlah_WP	.989	1.011

Sumber : Data diolah dari lampiran, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, telah diketahui nilai *tolerance* dan VIF dari variabel penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak sebesar 0,989 dan 1,011. Hasil tersebut membuktikan bahwa seluruh variabel berdasarkan nilai $tolerance > 0,1$ dan $VIF < 10$ sehingga dapat dikatakan bahwa suatu model telah terbebas dari masalah multikolinieritas.

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi dalam suatu model regresi antara residual pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Pengujian Autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan

Durbin-Watson Test. Hasil perhitungan *Durbin-Watson Test* (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada taraf kepercayaan (α) =0,05. Tabel d memiliki dua batas yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL) yang dapat dilihat berdasarkan nilai n dan k. Model regresi yang baik apabila terbebas dari masalah autokorelasi positif maupun negatif yaitu dengan nilai d lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari 4-du ($du < d < 4-du$).

Tabel 14 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.441 ^a	.195	.159	6.418E7	1.861

a. Predictors: (Constant), Jumlah_WP, Penagihan_Pajak

b. Dependent Variable: PPh

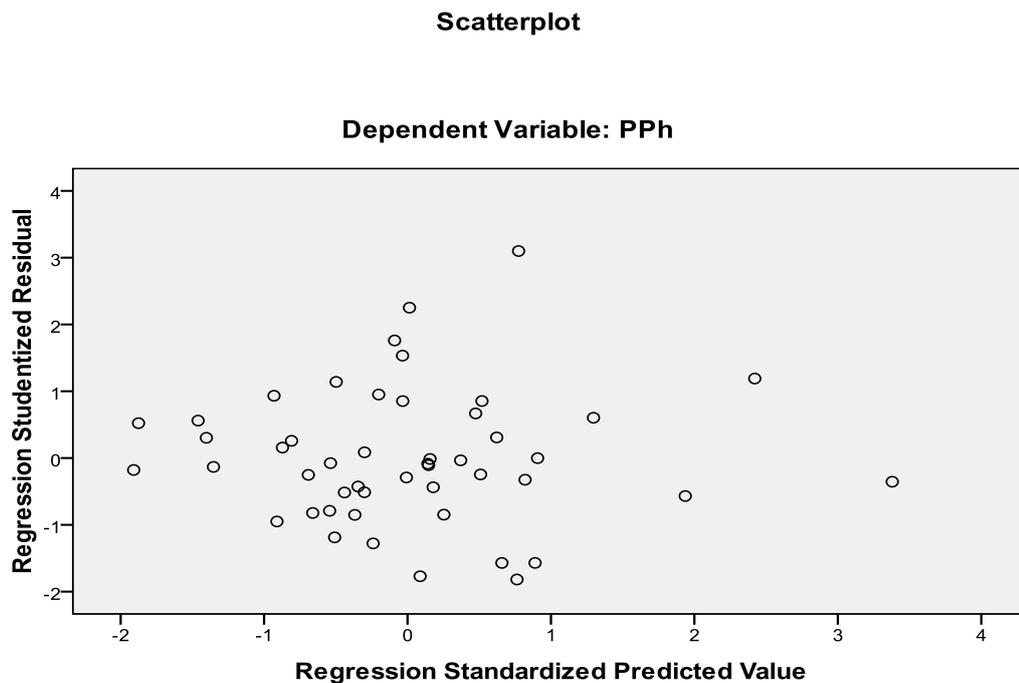
Sumber : Lampiran 6, 2017

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 1,861. Hasil tersebut berada diatas nilai dU yang berdasarkan tabel Durbin-Watson N=48, K=2 sebesar 1,623 dan dibawah nilai 4-dU ($4-1,623 = 2,377$). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai d berada diantara dU dan 4 – dU ($1,623 < 1,861 < 2,377$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, yaitu variansnya konstan sehingga suatu model tidak berubah untuk setiap

pengamatan. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dengan mengamati titik-titik yang tersebar diantara sumbu X yang biasa disebut *standardied predicted value* (ZPRED) dan sumbu Y yang biasa disebut *studentized residual* (SRESID). Jika titik-titik menyebar secara acak dan melebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi tersebut homoskedastisitas. Hasil pengujian dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas atau abstrak. Selain itu, titik-titik menyebar secara acak serta melebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut adalah

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti varians dari residual satu ke pengamatan lainnya konstan.

4) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model yang akan digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal adalah data yang diperoleh dari populasi yang terdistribusi normal sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Pengujian data yang terdistribusi normal dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram, grafik *Normal Probability Plot* dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada penelitian ini menggunakan pengujian statistik melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 maka data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.28005074E7
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.725
Asymp. Sig. (2-tailed)		.669

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Lampiran 5, 2017

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,669. Nilai tersebut lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa data terdistribusi normal.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan model regresi, peneliti dapat mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui bantuan SPSS 17.0 seperti tabel berikut:

Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Standardized Coefficients	t Hitung	t Sig.
	Beta		
Penagihan_Pajak	.282	2.093	.042
Jumlah_WP	.371	2.759	.008
<i>Adjust R Square</i>	0,159		
<i>F Hitung</i>	5,444		
<i>F Sig.</i>	0,008		
<i>N</i>	48		

Sumber : Data diolah dari lampiran, 2017

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, koefisien variabel bebas memiliki satuan variabel yang tidak sama (rupiah, unit) sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu. Koefisien variabel bebas yang telah distandarisasi dapat dilakukan interpretasi berdasarkan kolom *Standardized coefficients beta*. Berdasarkan hasil perhitungan

uji analisis regresi linier berganda tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 0,282X_1 + 0,371 X_2 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak (X_1) dan jumlah Wajib Pajak (X_2) mempunyai arah yang positif atau berbanding lurus dengan variabel penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi linier penagihan pajak adalah sebesar 0,282 satuan, yang memiliki arti bahwa penagihan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penagihan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,282 satuan dan begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan penagihan pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar 0,282 satuan dengan asumsi bahwa Jumlah Wajib Pajak nilainya konstan.
- b. Koefisien regresi linier jumlah Wajib Pajak adalah sebesar 0,371 satuan, yang memiliki arti bahwa jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jumlah Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,371 satuan dan begitu pula sebaliknya apabila

terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar 0,371 satuan dengan asumsi bahwa penagihan pajak nilainya konstan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu variabel independen, yaitu penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak, menerangkan variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hampir menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai *Adjusted R^2* digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dikarenakan nilai *Adjusted R^2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berbeda dengan R^2 yang setiap tambahan satu variabel maka nilai R^2 tetap meningkat tanpa memedulikan suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 16, maka diperoleh nilai *Adjusted R^2* sebesar 0,159. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak, mampu menerangkan sebesar 15,9% variasi variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan sisanya 84,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

d. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak, berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Cara untuk mengetahui suatu variabel mempunyai pengaruh simultan atau tidak, dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata sebesar 0,05 (5%). Berdasarkan analisis data melalui bantuan SPSS 17.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 17 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.485E16	2	2.242E16	5.444	.008 ^a
	Residual	1.854E17	45	4.119E15		
	Total	2.302E17	47			

a. Predictors: (Constant), Jumlah_WP, Penagihan_Pajak

b. Dependent Variable: PPh

Sumber : Lampiran 7, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,008 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H1 diterima.

e. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak, berpengaruh secara parsial terhadap variabel

terikat, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Cara untuk mengetahui suatu variabel mempunyai pengaruh parsial atau tidak, dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata sebesar 0,05. Berdasarkan analisis data melalui bantuan SPSS 17.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Penagihan Pajak

Pengujian terhadap variabel penagihan pajak berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,042. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan ($0,042 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_2 diterima.

b. Jumlah Wajib Pajak

Pengujian terhadap variabel jumlah Wajib Pajak berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan ($0,008 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_2 diterima.

D. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,008 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa perubahan pada setiap variabel independen secara bersama-sama merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menjelaskan keragaman atau perubahan penerimaan Pajak Penghasilan. Penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilan ditentukan berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya berupa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan dalam rangka ekstensifikasi perpajakan yang berguna untuk menambah jumlah Wajib Pajak, dan kebijakan dalam rangka intensifikasi perpajakan atau penegakan hukum seperti melakukan penagihan pajak (Rahayu, 2010).

2. Pengaruh Parsial

a. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,042 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,282. Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu yang bertujuan agar Wajib Pajak melunasi hutang pajaknya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan banyaknya lembar surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012 sebesar 1292 lembar, pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya menjadi sebesar 1859 lembar, sedangkan tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 1171 dan 996 lembar. Kegiatan penagihan pajak dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-rata yaitu sebesar 1329,5 lembar. Penagihan pajak ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sampai saat tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran atau melunasi hutang pajaknya sebagai bagian dari upaya penggalan potensi perpajakan yaitu intensifikasi perpajakan. Penggalan potensi yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penagihan pajak berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran yang terjadi dalam penerimaan Pajak Penghasilan sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan (Rahayu,2010:247).

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari peneliti terdahulu yaitu pada penelitian Syahab (2009) dan Hernadi (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

b. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi kurang dari taraf nyata ($0,008 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,371. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh jumlah Wajib Pajak yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena Wajib Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai *Beta* sebesar 0,371 yang merupakan nilai tertinggi daripada variabel penagihan pajak di dalam penelitian ini. Setiap adanya

penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. Penambahan jumlah Wajib Pajak dapat ditunjukkan pada tahun 2012, total penambahan Wajib Pajak sebesar 4821 Wajib Pajak. Tahun 2013, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 5426 Wajib Pajak. Tahun 2014, mengalami penurunan sebesar 4765 Wajib Pajak dan kembali mengalami peningkatan sebesar 5655 Wajib Pajak pada tahun 2015. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak dalam 4 tahun terakhir sebesar 5166,75 Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang tinggi maka dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang disetorkan kepada negara.

Soemitro dalam Rahayu (2010:90), “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Berdasarkan teori pertumbuhan Neo Klasik yang dikembangkan oleh Solow menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya tersebut maka dapat berdampak bagi pendapatan suatu negara sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal ini ditunjukkan seperti menjaring penduduk untuk menjadi Wajib Pajak dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari peneliti terdahulu yaitu pada penelitian Anti (2014) dan Nicole Pratama (2015) yang menyatakan bahwa

jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang penagihan pajak yang menghitung jumlah surat teguran dan surat paksa tidak menjelaskan fenomena yang terjadi dalam hal peningkatan penerimaan pajak penghasilan.